



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

POLEMIK PPDB YANG TERUS BERULANG

Dinar Wahyuni

Analisis Legislatif Ahli Madya
dinar.wahyuni@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Dalam rangka mendukung tahun ajaran baru, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengeluarkan aturan turunan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 sebagai dasar pelaksanaan PPDB 2024/2025. Sesuai aturan tersebut, pelaksanaan PPDB 2024/2025 dibagi menjadi empat jalur mulai dari zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan prestasi. Adapun kuota jalur zonasi SD, minimal 70%; SMP minimal 50%; dan SMA minimal 50%. Dalam menentukan besaran pada jalur zonasi, pemerintah daerah dapat mengatur lebih besar kuota daya tampung setelah melakukan penghitungan jumlah daya tampung dan proyeksi calon peserta didik. Selain mengeluarkan aturan turunan PPDB, Kemendikbudristek bersama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, serta Ombudsman RI membentuk forum bersama pengawasan pelaksanaan PPDB 2024/2025. Forum ini dibentuk agar pelaksanaan PPDB menjadi objektif, transparan, dan akuntabel.

Persiapan pemerintah menghadapi PPDB ternyata belum mampu mencegah permasalahan berulang yang selalu muncul setiap memasuki tahun ajaran baru. Berbagai aduan kecurangan dan masalah masih berlangsung di berbagai daerah pada PPDB 2024/2025. Berdasarkan laporan pengaduan dan pemantauan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), hingga 20 Juni 2024, tercatat sebanyak 162 kasus praktik curang dalam pelaksanaan PPDB 2024/2025. Adapun kasus tersebut meliputi praktik tipu-tipu nilai untuk jalur prestasi (42%), manipulasi kartu keluarga di jalur zonasi (21%), kecurangan jalur mutasi (7%), ketidakpuasan orang tua di jalur afirmasi (11%), serta dugaan gratifikasi sebanyak 19% dari total kasus yang tercatat.

Dari berbagai kasus tersebut, beberapa faktor penyebab berulangnya masalah PPDB adalah sebagai berikut, *pertama*, secara teknis, sistem PPDB masih membuka peluang terjadinya praktik pelanggaran. Seperti yang terjadi di Palembang, tujuh sekolah terindikasi melakukan pelanggaran pada PPDB jalur prestasi. Sekolah tersebut diduga melakukan praktik permainan dan pungutan liar oleh oknum pegawai hingga petinggi Dinas Pendidikan Sumatera Selatan. Dari kasus tersebut, komitmen pihak yang terlibat PPDB dipertanyakan karena pusaran kecurangan sudah sampai ke ranah dinas pendidikan setempat. *Kedua*, pandangan masyarakat terhadap sekolah yang dianggap unggulan. Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang berpikir untuk menyekolahkan anaknya di sekolah yang dianggap unggulan meskipun melalui jalan pintas. Hal ini dapat dipahami karena jumlah dan kualitas layanan sekolah di Indonesia belum merata. *Ketiga*, sistem pengawasan yang masih lemah. Tindak lanjut pengaduan pelanggaran PPDB juga masih lambat. Penegakan hukum terhadap pelanggaran PPDB masih lemah sehingga tidak menimbulkan efek jera di masyarakat. Perlu mekanisme investigasi dan penindakan untuk mengusut kasus pelanggaran tersebut.

Keempat, pendataan calon peserta didik afirmasi masih belum tepat. *Updating* data sering tidak sesuai, dampaknya calon peserta didik afirmasi yang tidak bisa mendaftar di PPDB jalur afirmasi. Setelah ditelusuri, ternyata calon peserta didik afirmasi tersebut tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial. Persoalan data memang menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang perlu segera dibenahi mengingat dampak dari kesalahan pendataan terhadap masyarakat penerima. *Kelima*, masih rendahnya pemahaman orang tua dan calon peserta didik terkait PPDB seperti kesulitan teknis dalam proses PPDB mulai dari pembuatan akun hingga pemahaman sistem zonasi. Salah satu penyebabnya adalah sosialisasi dan edukasi yang telah dilakukan pemerintah belum tepat menasar orang tua dan calon peserta didik.

Berbagai permasalahan pelaksanaan PPDB berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Konsep PPDB jalur zonasi yang bertujuan untuk mengatasi pemerataan pendidikan justru menjadi momok bagi orang tua saat akan memilih sekolah untuk anaknya. Hal ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah untuk mengatasinya.

Atensi DPR

Menghadapi permasalahan berulang dalam PPDB, Komisi X DPR RI perlu melakukan beberapa langkah dalam fungsi pengawasan, yaitu:

1. Meminta Kemendikbudristek untuk melakukan pembenahan menyeluruh sistem PPDB dengan mengacu pada hasil evaluasi PPDB tahun sebelumnya.
2. Mendorong Kemendikbudristek untuk memperbaiki sistem pendataan kuota siswa di sekolah termasuk data peserta didik yang akan melanjutkan studi di zona tertentu untuk setiap jenjang pendidikan. Kemendikbudristek perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar sesuai dengan kebutuhan daerah.
3. Mendorong pemerintah mengalokasikan dana untuk sekolah negeri yang selama ini dianggap kurang unggul sebagai salah satu upaya pemerataan pendidikan. Apabila jumlah dan kualitas sekolah merata, maka pandangan masyarakat terhadap sekolah unggulan akan berubah.
4. Mendorong Kemendikbudristek untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk aktif melakukan edukasi dan sosialisasi PPDB secara tepat sasaran.
5. Penegakan sanksi atas pelanggaran PPDB perlu diperkuat agar menimbulkan efek jera di masyarakat. Perlu mekanisme investigasi dan penindakan untuk mengusut kasus pelanggaran tersebut.

Sumber

bbpmpjateng.kemdikbud.co.id, 15 Mei 2024;

detik.com, 21 Juni 2024;

kompas.id, 21 Juni 2024; dan

tirto.id, 26 Juni 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Ekkuinbang
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Ariesy Tri Mauleny

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikh P.S.
Fieka Nurul A.

@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2024